

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh

Fani Fadillah¹, Fatma Erwita² Fatimah Azzahra³
Lutfhia Regina Jambak⁴ Risa Yolanda⁵

¹Fani Fadillah adalah Mahasiswa Universitas Samudra, Aceh, Indonesia

Email: fanifadillah080501@gmail.com

²Fatma Erwita adalah Mahasiswa Universitas Samudra, Aceh, Indonesia

Email: fatmaerwita4@gmail.com

³Fatimah Azzahra adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Prof. Dr. HAMKA, Jakarta, Indonesia

Email: azzahfatimah3802@gmail.com

⁴Lutfhia Regina Jambak adalah Mahasiswa Universitas Samudra, Aceh,
Indonesia

Email : reginalutfia03@gmail.com

⁵Risa Yolanda adalah Mahasiswa Universitas Samudra, Aceh, Indonesia

Email : risayolanda105@gmail.com

Abstract

This study aims to examine how regional spending and the Human Development Index in Aceh province are influenced by Regional Native Income and Gross Regional Domestic Product. Using secondary data, this study was conducted in Aceh Province. The purpose of this study is to determine the relationship between Regional Native Income (PAD) and GRDP with Regional Expenditure (BD) and the Human Development Index in Aceh Province. Path analysis using Eviews software version 12 is a data analysis technique used in this study. The findings of the study show that simultaneously [1] Regional Native Income and GRDP have no visible impact on regional spending. [2] Local Revenue and GRDP have a considerable influence on the Aceh Provincial Human Development Index.

Keywords: PAD, PDRB, Regional Expenditures, IPM

PENDAHULUAN

Target Pemerintah Provinsi Aceh adalah 6%, dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,5%, sehingga pertumbuhan ekonomi provinsi di tahun 2012 lebih rendah dari reratanya. Hanya 5,02% pemilik migas Aceh dan 5,89%

Pengaruh
Pendapatan.....

Jurnal Sosiohumaniora
Kodepena

pp. 1-12



penduduk nonmigas provinsi tersebut yang target pertumbuhan ekonominya terealisasi pada tahun 2011.

Pencapaian ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tingkat pertumbuhan 2,79% dan 5,49% yang dicapai pada tahun 2010 (masing-masing) ketika produksi minyak dan gas tidak diperhitungkan.

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia memiliki nilai yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Rata-rata indeks pembangunan daerah di Provinsi Aceh sendiri memiliki nilai yang tidak terpaut jauh berbeda dengan nilai indeks pembangunan di Indonesia.

Setiap daerah harus mengenal potensi dan memahami sumber daya yang dimilikinya dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah berupa mewujudkan kekuatan fiskal. Dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk menyelidiki sumber-sumber pendanaan, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan pemerintah daerah akan lebih siap untuk memenuhi tuntutan keuangan pemerintah dan pembangunan daerah.

Semakin banyak kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, semakin banyak permintaan untuk lebih banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu ada eksplorasi peluang pendapatan daerah sebanyak yang diperbolehkan secara hukum.

Pengeluaran pemerintah daerah telah terbukti dapat merangsang pembangunan ekonomi di daerah yang dilayaninya. Menurut para pendukung teori ekonomi pembangunan, pendapatan pajak dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) keduanya berkontribusi pada ekonomi yang berkembang.

STUDI KEPUSTAKAAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Wijaya dikutip dari (Williantara & Budiasih, 2016), Dalam kerangka desentralisasi, kemampuan daerah paling efektif didukung oleh pendapatan daerah yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, jelas bahwa setiap daerah perlu memanfaatkan sumber dayanya sendiri sebaik-baiknya, karena keberhasilan desentralisasi diukur dengan seberapa kecil otonomi yang dipertahankan setiap daerah dari pemerintah pusat. Menggunakan PAD untuk tujuan pembangunan daerah atau tata kelola yang sah dianjurkan untuk pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dengan lebih baik sebagai aspek inti dari desentralisasi, PAD berupaya membekali pemerintah daerah dengan sarana untuk meningkatkan potensi pendanaan daerah. Perluasan PAD merupakan tujuan jangka panjang karena merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendorong pembangunan pemerintahan daerah dan menjadi standar pelaksanaan otonomi daerah. Terdapat disparitas pendapatan dan belanja karena adanya variasi PAD daerah di Indonesia

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

(Sanusi & Yusuf, 2018) mengungkapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai moneter dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi di semua wilayah selama periode waktu tertentu pada tahun tertentu.

PDRB ialah perhitungan yang berguna dalam rangka menentukan distribusi pertumbuhan ekonomi. Distribusi pembangunan yang adil akan mengarah pada peningkatan pendapatan dari produk dan layanan yang dihasilkan. Karena kelayakan ekonomi daerah dapat diukur, dan kompensasi untuk faktor produksi suatu daerah dapat dihitung, PDRB merupakan indikator ekonomi yang penting.

Menurut (Arsyad, 1999), Nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah, terlepas dari siapa yang memiliki mesin yang digunakan untuk membuatnya, merupakan produk domestik regional bruto (PDRB). Produk Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah, seperti yang didefinisikan oleh Bank Indonesia (2016).

Ada dua metode untuk menentukan PDRB suatu daerah: menggunakan harga berlaku atau harga konstan. Nilai barang dan jasa setelah memperhitungkan inflasi inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai PDRB dengan harga berlaku. Menghitung PDRB dengan harga berlaku suatu wilayah adalah ukuran yang dapat diandalkan untuk menilai potensi ekonomi, transfer sumber daya, dan struktur organisasinya. Ketika kita berbicara tentang PDRB dengan harga konstan, kita berbicara tentang nilai produk dan jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu dikalikan dengan harga jualnya pada tahun tersebut. Dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan ekonomi tahunan dihitung (Bank Indonesia, 2016).

Belanja Daerah (BD)

Menurut Permendagri No.13/2006, belanja daerah diartikan sebagai perkiraan beban pengeluaran yang harus dibagi secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh (relatif) semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Belanja daerah menggabungkan belanja langsung dan tidak langsung. Belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja modal merupakan contoh belanja langsung. Sebaliknya, komponen belanja tidak langsung mencakup hal-hal seperti biaya kompensasi, pembayaran bunga, pembayaran bantuan sosial, bagi hasil, hibah, subsidi, belanja tak terduga, dan bantuan keuangan. Belanja langsung adalah jenis pengeluaran yang dapat ditemukan dalam anggaran pemerintah daerah dan mencakup hal-hal seperti belanja modal. Belanja modal mendanai kegiatan pemerintah dengan membeli atau membangun aset jangka panjang. Karenanya, anggaran belanja modal meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, sistem irigasi, dan sebagainya.

Menurut UU 17/2003, APBD merupakan sarana de facto penyelenggaraan keuangan daerah. Kementerian Urusan Sipil memberikan persetujuan akhir atas

rencana keuangan tahunan pemerintah, yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD tidak hanya sebagai alat perencanaan untuk tahun yang akan datang, tetapi juga sebagai alat untuk melacak pengeluaran dan pendapatan daerah. Pendapatan, belanja, dan pendanaan daerah merupakan bagian dari APBD. Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-lain Pendapatan yang sah (LPS).

Belanja daerah didefinisikan oleh UU No.33/2004 sebagai selisih antara kewajiban daerah dengan kekayaan bersih untuk periode yang bersangkutan. Pengeluaran di suatu daerah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaannya: peningkatan kesehatan, pariwisata, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum, pendidikan, agama, budaya, dll.

Belanja daerah dirinci sebagai berikut, sesuai Permendagri No.21/2011 mengenai Perubahan Kedua:

Belanja Langsung mengacu pada alokasi moneter yang langsung digunakan untuk mendanai tujuan proyek tertentu. Belanja langsung mencakup hal-hal seperti belanja barang dan jasa, pegawai, dan modal.

Belanja Tidak Langsung yakni dana yang dikeluarkan dari anggaran yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan prakarsa yang direncanakan. Kabupaten juga mengalokasikan sejumlah uang untuk pengeluaran tidak langsung seperti yang dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat lokal dan untuk mendorong pertumbuhan proyek pendidikan, medis, dan infrastruktur lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) adalah badan PBB yang berkontribusi mengembangkan pendekatan pembangunan manusia (UNDP, 2008). Sebuah konsep pusat teori pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia memposisikan peningkatan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan.

Menurut Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS (2015) harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan tingkat pendapatan di semua negara diukur dan dibandingkan dengan memanfaatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ukuran yang dimanfaatkan dalam rangka menilai bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi kualitas hidup masyarakat di berbagai negara dan mengategorikannya sebagai negara maju, berkembang, atau kurang berkembang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Badan Pusat Statistik, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan IPM menilai seberapa jauh kemajuan suatu bangsa dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan bangsanya. Menurut (Arab Human Development Report, 2002), investasi dalam pengembangan SDM dapat meningkatkan kapasitas. Pembangunan manusia didasarkan pada gagasan bahwasanya orang harus mengambil bagian dalam proses motivasi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. IPM

ditentukan dengan perhitungan karena menyadari pentingnya fokus pada kualitas sumber daya manusia.

Indikator yang UNDP gunakan dalam rangka melakukan perhitungan IPM dituangkan dalam Human Development Report (1990), diantaranya:

Usia panjang yang ditentukan oleh harapan hidup kelahiran.

Pendidikan dihitung sebagai perhitungan rerata tertimbang tingkat melek huruf sebagai fungsi dari rerata jumlah tahun yang dihabiskan orang berusia 15 tahun ke atas di sekolah (ditimbang dengan dua pertiga).

PDB per kapita dalam harga konstan, didiskon untuk mencerminkan penurunan cepat dalam daya beli mata uang nasional dan utilitas marjinal pendapatan; ini adalah "pendapatan" yang sedang dibicarakan.

Penelitian Terdahulu

Menggunakan data Pendapatan Asli Daerah dan PDRB, peneliti sebelumnya menemukan korelasi antara belanja daerah dengan IPM sebagai berikut:

(Putrisandya & Dewi, 2021) tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, PDRB terhadap Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia". PAD, DAU, dan PDRB merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Berikut temuan penelitian: (1) PAD dan DAU setiap kabupaten dan kota di Provinsi Bali berdampak langsung dan menguntungkan bagi belanja daerah, sedangkan PDRB secara langsung dipengaruhi secara negatif dan tidak sama sekali. (2) Pendapatan Asli Daerah dan PDRB memiliki dampak menguntungkan langsung terhadap IPM, sedangkan dampak Dana Alokasi Umum kurang signifikan. Sementara itu, di Provinsi Bali, IPM kabupaten/kota terkena dampak negatif yang signifikan dari belanja daerah. (3) IPM di provinsi, kabupaten, dan kota di Bali tidak dimediasi oleh DAU, Pendapatan Asli Daerah, dan PDRB.

(Sanusi & Yusuf, 2018) penelitiannya tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression." PAD, IPM, PDRB, jumlah penduduk, dan pembangunan ekonomi terbukti berdampak besar pada belanja daerah di Sumatera Utara.

Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Daerah

Menurut (Jolianis, 2014) dalam penelitiannya, alokasi Belanja Daerah juga akan ditingkatkan untuk daerah yang memiliki PAD tinggi. Selain itu ada pula pendapat menurut (Nurdini et al., 2015) PAD yang lebih tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah dapat memenuhi permintaannya sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Pendapatan yang dihasilkan di suatu daerah sebagai hasil dari sumber daya yang dimilikinya ialah salah satu pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mengalami kenaikan ketika suatu daerah kaya akan sumber daya alam dan juga terlayani dengan baik oleh berbagai faktor lain pendongkrak produktivitas.

Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Terbukti dari temuan (Putra & Ulupui, 2015), (Sarkoro & Zulfikar, 2018), dan (Setyowati & Suparwati, 2012), IPM sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah.

Menurut Abdullah & Solichin dalam (Setyowati & Suparwati, 2012), sumber utama pendanaan kemampuan daerah dalam menegakkan otonomi daerah berasal dari PAD. Karenanya, PAD sebagai proksi pendapatan asli daerah diharapkan dapat menyediakan dana untuk meningkatkan infrastruktur masyarakat yang ada.

Hubungan Antara PDRB Dengan Belanja Daerah

Menurut (Jaya & Dwirandra, 2014), pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama bagi pemerintah federal dan negara bagian, sebagaimana dibuktikan oleh PDRB. Peningkatan produktivitas dan pendapatan per orang mendorong peningkatan kesejahteraan, yang tercermin dalam pelayanan publik dan infrastruktur yang lebih baik yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Uang yang dialokasikan ke berbagai daerah memungkinkan hal ini terjadi. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih baik di masa mendatang, belanja daerah untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur dan fasilitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi.

Hubungan Antara PDRB Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Larasati, 2018), PDRB sering digunakan untuk mengukur kemajuan. Ketika PDRB suatu daerah meningkat, demikian pula standar hidup di sana. Hal ini karena standar hidup suatu negara dapat diukur dengan melihat PDRB per kapitanya. PDRB per kapita yang lebih tinggi juga menunjukkan standar hidup yang lebih tinggi. Daya beli penduduk dapat diperkirakan dari pendapatan per kapitanya. Oleh karena itu, untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang, pendapatan yang lebih tinggi memerlukan pengeluaran yang lebih tinggi. IPM berkorelasi positif dengan PDRB per kapita. Akibatnya, kenaikan PDRB per kapita menghasilkan kenaikan yang sesuai dalam IPM.

Hubungan Antara Belanja Daerah Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Sarkoro & Zulfikar, 2018) peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia akan dibantu tidak sedikit oleh sumber daya yang dialokasikan ke berbagai daerah. Untuk dapat membiayai sendiri kegiatan pembangunan, daerah harus memiliki pemerintah daerah yang berkompeten yang dapat mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerah serta mengalokasikan belanja daerah secara efektif. Dengan demikian, pemerintah mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan, khususnya dalam pengembangan SDM yang unggul di sejumlah bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Untuk itu, distribusi

sumber daya yang lebih merata di seluruh wilayah berkorelasi langsung dengan pembangunan manusia yang lebih baik.

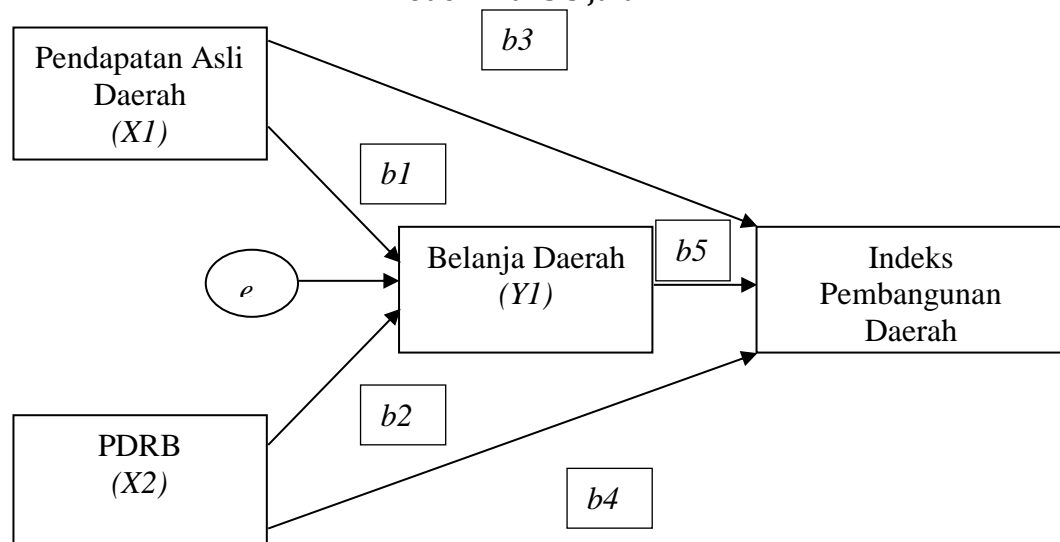
METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini, metodologi penelitian kuantitatif digunakan. Istilah "metode kuantitatif" mengacu pada studi analisis data numerik secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis dan hasil uji statistik menentukan hubungan antar variabel yang akan dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, PDRB, dan belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.

Penelitian ini memanfaatkan analisis jalur (*Path Analysis*) pada teknik analisis data untuk menentukan jawabannya. Analisis jalur adalah bentuk yang lebih maju dari regresi linier berganda. Temuan ini memberikan analisis kuantitatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari BPS provinsi Aceh. PAD, PDRB terhadap Belanja Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia adalah beberapa statistik yang dianalisis.

Berikut adalah model Analisis Jalur (*path Analysis*):

**Gambar 1
Model Analisis Jalur**



$$Y1 = \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + e1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y2 = \beta_3 X1 + \beta_4 X2 + \beta_5 Y1 + e2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = PDRB

Y1 = Belanja Daerah

Y2 = Indeks Pembangunan Daerah

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

$e_1, e_2 = \text{Error}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi Persamaan Substruktur I

Variabel uji struktural pertama pada studi ini menguji pengaruh PAD dan PDRB pada belanja daerah di Provinsi Aceh. Berikut ringkasan hasil pengujian yang dinyatakan pada tabel.

Tabel 1
Hasil Regresi Persamaan Substruktur I

Regresi	Koefisien	Standar Error	t. Hitung	Probabilitas	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,0852	0,1298	0,6565	0,5325	Tidak Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	-0,2097	0,1019	-2,0555	0,0789	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berikut adalah hasil regresi persamaan substruktur I seperti pada Tabel 1:

$$Y_1 = 0,0852 Y_1 X_1 - 0.2097 Y_1 X_2 + e_1$$

Temuan analisis regresi variabel penelitian ini memperlihatkan bahwasanya *standardized coefficient beta* melampaui nilai alpha 0,05 senilai 0,0852 dengan probabilitasnya 0,5325. Alhasil, H_0 disetujui serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh tidak berdampak pada belanja daerah.

Analisis regresi variabel penelitian ini menghasilkan *standardized coefficient beta* senilai -0,2097 dan probabilitasnya 0,0789, keduanya signifikan secara statistik bila diperbandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Artinya H_0 diterima, dan belanja daerah di Aceh tidak dipengaruhi oleh PDRB.

Uji R

Nilai R-Square dan estimasi koefisien determinan yang diperoleh berjumlah 0,4395 atau 43,95%. Maknanya variabel Pendapatan Asli Daerah dan PDRB mampu menyumbang sebanyak 43,95% dalam variabel belanja daerah di Provinsi Aceh, sedangkan sisanya senilai 50,05% disebabkan adanya sejumlah variabel di luar cakupan analisis ini.

Uji F

Bila $0,1319 > \alpha = 0,05$ maka uji F pada penelitian ini memberikan hasil yang signifikan. Belanja daerah Provinsi Aceh selanjutnya dapat ditunjukkan tidak terpengaruh oleh PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami juga menolak H_3 , yang berpendapat bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara Pendapatan Asli Daerah dan PDRB dan belanja daerah di Provinsi Aceh.

Hasil Regresi Persamaan Substruktur II

Uji struktural kedua terhadap variabel yang dikaji pada riset ini akan dipusatkan pada pengaruh PAD, PDRB, dan belanja daerah terhadap IPM di Provinsi Aceh. Berikut ringkasan hasil pengujian yang dinyatakan pada tabel.

Tabel 2
Hasil Regresi Persamaan Substruktur II

Regresi	Koefisien	Standar Error	t. Hitung	Probabilitas	Keterangan
X ₁ -> Y ₂	-0,0088	0,0103	-0,8525	0,4267	Tidak Signifikan
X ₂ -> Y ₂	0,1662	0,0099	16,7012	0,0000	Signifikan
Y ₁ -> Y ₂	0,4005	0,0291	1,3923	0,2132	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil Penelitian 2022

Berikut hasil regresi persamaan substruktural II seperti pada Tabel 2:

$$Y_2 = - 0,0088 Y_2 X_1 + 0,1662 Y_2 X_2 + 0,4005 Y_1 Y_2 + e_2$$

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Crismanto (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2006-2015.

Temuan analisis regresi variabel yang diamati terlihat bahwasanya Standardized Coefficient Beta senilai -0,0088 dengan probabilitasnya 0,4267 melampaui nilai alpha 0,05. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, sehingga H₀ diterima.

Standardized coefficient beta senilai 0,1662, dan probabilitas terkaitnya senilai 0,0000 lebih rendah dari angka alfa 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel penelitian secara signifikan terkait dengan hasil. Jadi, diperoleh kesimpulan bahwasanya IPM di Provinsi Aceh terpengaruh oleh PDRB, sehingga H₀ ditolak.

Analisis regresi variabel penelitian ini menghasilkan Standardized coefficient beta 0,4005, dan nilai probabilitas 0,2132, keduanya lebih tinggi dari ambang batas signifikansi 0,05. Dengan kata lain, IPM Aceh tidak dipengaruhi oleh belanja daerah, menunjukkan bahwa H₀ diterima.

Uji R

R-Square yang diperoleh dan estimasi koefisien determinan dijumlahkan menjadi 0,9863 atau 98,63%. Dalam makna lain variabel PAD, PDRB, serta belanja daerah dapat menyumbang sebesar 98,63% terhadap variabel IPM Aceh, sedangkan sisanya sebesar 1,37% disebabkan oleh sejumlah faktor di luar cakupan analisis ini.

Uji F

Pada studi ini diperoleh hasil uji F pada rentang $0,0000 < \alpha = 0,05$. IPM di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, PDRB, dan belanja daerah. Hasilnya, kami menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa IPM di Provinsi Aceh dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan PAD, PDRB, dan belanja daerah sekaligus.

KESIMPULAN

Dari analisis variabel penelitian ini, kesimpulan ditarik. Sebagai sumber dana langsung, Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh memiliki dampak yang kecil namun positif terhadap belanja daerah. Sementara itu, belanja daerah di Provinsi Aceh terkena dampak negatif langsung dari PDRB dalam skala kecil.

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh terkena dampak negatif dari Pendapatan Asli Daerah, meskipun hanya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia tidak dipengaruhi secara signifikan oleh program pembangunan pemerintah daerah yang dibiayai oleh belanja modal.

PDRB berdampak pada IPM Provinsi Aceh baik secara langsung maupun tak signifikan, sedangkan IPM Provinsi Aceh dipengaruhi secara langsung dan tidak signifikan oleh belanja daerah. Standar hidup yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas hidup secara umum dapat disimpulkan dari peningkatan pendapatan suatu daerah. Meskipun demikian, tidak semua orang menerima PDRB. Akibatnya, tidak cukup hanya memikirkan untuk meningkatkan pendapatan secara keseluruhan; sebaliknya, sangat penting untuk memikirkan tentang pemerataan pendapatan itu secara merata di semua kelas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arab Human Development Report. (2002). *Human Development: Definition, Concept and Larger Context*. Arabhdr.Org.
<http://www.arabhdr.org/publications/contents/2002/ch1-e.pdf>
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79–92.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/8643/6440>
- Jolianis, J. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pelangi*, 7(1).
<https://doi.org/10.22202/jp.v7i1.191>
- Larasati, D. (2018). *Analisis Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, PDRB per Kapita, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*

- Tahun 2013-2016 [Bachelor'S Thesis, UIN Syarif Hidayatullah].
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39602>
- Nurdini, R., Wiratno, A., & Farida, Y. N. (2015). Analisis Flypaper Effect pada dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (BD) kabupaten/kota di Jawa Barat. *JAKA (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan): Research, Invent, Solve and Share*, 2(1), 80–94.
<http://journal.peradaban.ac.id/index.php/jak/article/view/253>
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(3), 863–877.
- Putrisandya, A. A., & Dewi, M. H. U. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, PDRB Terhadap Belanja Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 10(11), 4717–4744.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/71498/42087>
- Sanusi, A., & Yusuf, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Journal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 50–56.
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/201>
- Sarkoro, H., & Zulfikar, Z. (2018). Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54–63.
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1972>
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi*, 9(1), 113–133.
- UNDP. (2008). *Human Development Report 2007/2008*. United Nations University Press.

Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2044–2070.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/19203/15404>

Copyright © 2023, Fani Fadillah, Fatma Erwita Fatimah Azzahra, Lutfhia Regina Jambak, Risa Yolanda

The manuscript open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.